

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan diri serta menjadi alat untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan segala aspek kemampuan berpikirnya yang berguna sebagai bekal pengembangan di masa depan. Dengan pendidikan juga, status sosial seseorang dapat mengalami perubahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dapat digunakan sebagai saluran mobilitas sosial dan juga jembatan kehidupan yang dapat mengubah kondisi kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Dengan mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat, sudah sepantasnya bahwa setiap orang harus mendapatkan pendidikan yang layak guna memperoleh manfaat dari pendidikan tersebut.

Terdapat berbagai macam permasalahan pendidikan yang salah satunya adalah tidak meratanya akses atau kesempatan pendidikan bagi kaum miskin. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh masalah kemiskinan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amartya Sen dalam Rahmat 2014, yang menyatakan bahwa, kemiskinan terkait dengan kesempatan yang minim yang

tersedia bagi orang miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya.¹ Dengan kesempatan yang minim khususnya dalam bidang pendidikan, kaum miskin atau masyarakat miskin tidak dapat mengembangkan diri melalui pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Berikut merupakan data perkembangan jumlah siswa putus sekolah menurut jenjang pendidikan tahun 2016/2017 dan 2017/2018 di Provinsi Banten.

Tabel I.1 Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 di Provinsi Banten

Tingkat/Kelas		Tahun Ajaran	
		2016/2017	2017/2018
1	SD	350	230
2	SD	324	151
3	SD	254	108
4	SD	248	102
5	SD	238	106
6	SD	225	229
Jumlah		1669	926
7	SMP	452	529
8	SMP	631	528
9	SMP	664	1615
Jumlah		1747	2672
10	SMA	415	234
	SMK	230	160
11	SMA	410	280
	SMK	236	94
12	SMA	418	670
	SMK	7	0
Jumlah		1716	1438

(Sumber : Statistik Data Kemendikbud Tahun 2019)²

¹Abdi Rahmat, 2014, "Gerakan Sosial Dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin", dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol.19, No. 1, Januari 2014: 27-56, hlm. 34.

²Statistik Pendidikan Tahun 2019, diakses melalui <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/smp>, pada 25 Juni 2019.

Berdasarkan tabel I.1 di atas, dapat diketahui perkembangan angka putus sekolah pada tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 di Provinsi Banten secara keseluruhan cukup tinggi. Angka putus sekolah tertinggi berada pada jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran 2017/2018 yakni 2.672 siswa. Angka tersebut meningkat dari tahun ajaran 2016/2017 yang semula 1.747 siswa. Angka putus sekolah tertinggi pada jenjang pendidikan SMP berada pada tingkatan kelas 9 atau yang setara dengan kelas 3 SMP. Angka tersebut meningkat dari 664 siswa menjadi 1.615 siswa pada tahun ajaran 2017/2018. Angka putus sekolah terendah ada pada jenjang pendidikan SMK khususnya pada tingkatan kelas 12 SMK, yakni yang pada tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 7 siswa, kemudian pada tahun ajaran 2017/2018 menjadi 0 siswa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui fakta bahwa adanya kondisi belum meratanya kesempatan dalam mengakses pendidikan di Provinsi Banten. Padahal dalam UUD dijelaskan bahwa mengikuti pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara.³ Hal ini menekankan pendidikan sebagai hak dan kewajiban yang sudah seharusnya didapatkan oleh setiap warga negara. Pemberian kesempatan untuk mengakses pendidikan sudah seharusnya didapatkan oleh seluruh warga negara tanpa melihat perbedaan golongan ekonomi, latar belakang agama, ras, suku, dan lain-lainnya. Pemerataan akses dalam pendidikan juga merupakan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pendidikan, bukan hanya

³Mohammad Saroni, 2013, *Pendidikan Untuk Orang Miskin*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 88.

bermanfaat bagi setiap individu yang mendapatkannya, tetapi juga bagi bangsa itu sendiri. Dengan menghasilkan warga negara yang berkualitas maka akan meningkatkan pula kualitas bangsa tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat dalam mengatasi permasalahan tidak meratanya akses pendidikan bagi masyarakat miskin, diantaranya dengan mengadakan pendidikan gratis dan bantuan pendidikan bagi warga miskin. Bantuan-bantuan tersebut diantaranya berupa pemberian beasiswa pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan lain sebagainya. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yakni pesantren. Pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan islam karena merupakan lembaga yang berupaya menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam diri para santri. Berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan umum lainnya.⁴ Berlandaskan nilai-nilai keislaman mendorong pendiri-pendiri pesantren untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin dengan pemberian pendidikan gratis hingga bantuan pendidikan lainnya. Hal tersebut dilandaskan atas nilai kepedulian terhadap sesama.

Beberapa pesantren memiliki program pendidikan gratis untuk anak-anak dari kalangan masyarakat miskin. Pesantren sebagai lembaga pendidikan

⁴Abd Halim Soebahar, 2013, *Modernisasi Pesantren Studi Transformatif Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, hlm. 33.

Islam di masyarakat tidak hanya menyelenggarakan pendidikan non-formal seperti kegiatan keagamaan, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal bagi para santrinya. Sistem pendidikan di pesantren dianggap dapat menjadi tempat terbaik bagi pendidikan kaum marjinal. Dengan sistem pembelajaran di pesantren yang komprehensif diharapkan setelah keluar dari pesantren, anak didik tidak hanya menguasai ilmu umum yang bersifat kognitif, tapi juga ilmu agama dan keterampilan hidup.⁵ Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo di Tangerang.

Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburomerupakan pesantren yang khususmelahirkan santri-santri penghafal Al-Quran. Dalam menjalankan program pendidikannya, Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu khususnya anak-anak *yatim*, *dhuafa*, dan *masakin*. Dana yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam menyelenggarakan pendidikan bagi kaum miskin merupakan dana filantropi yang berasal dari masyarakat. Adapun filantropi merupakan kedermawanan, kemurahanian, atau sumbangan sosial yang menunjukkan cinta kepada manusia.⁶ Pendidikan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo tidak hanya bersifat non-formal atau pembinaan kegiatan keagamaan saja, tetapi juga pendidikan

⁵Ta'rif, 2016, Pesantren Dan Anak Jalanan (Studi Penyelenggaraan Dikterapan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok), dalam *jurnal Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Volume 14, Nomor 2, hlm. 22.

⁶Aan Nasrullah, 2015, Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa, dalam *Jurnal Studia Islamika*. Vol.12, No.1, hlm. 3.

formal yang dilakukan disekolah maupun pesantren. Walaupun pendidikan yang diberikan oleh pesantren terbilang gratis, hal ini tidak menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada seluruh santrinya, hal ini terbukti dengan melihat para alumni-alumni lulusannya yang kini menjadi guru tahfidz yang dibutuhkan masyarakat di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.

Kajian penelitian ini berfokus pada pemerataan akses pendidikan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo bagi masyarakat yang berasal dari kalangan miskin. Penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana peran dan upaya lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang dalam hal ini adalah pesantren dalam memberikan pemerataan kesempatan pendidikan khususnya bagi masyarakat marginal. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam membuka pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin. Argumen utama pada tulisan ini adalah Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dapat dikatakan telah membuka jalan atau akses pendidikan bagi kaum miskin dengan penyelenggaraan pendidikan gratisnya yang komprehensif. Adapun bingkai konseptual yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep pemerataan kesempatan pendidikan. Hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji sebagai sebuah upaya dalam konteks pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat marjinal.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menggambarkan masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia khususnya di wilayah Tangerang Banten berdasarkan tabel I.1 menandakan belum meratanya akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang membuat masyarakat miskin jauh dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus kajian pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam memberikan pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin.

Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo merupakan lembaga pendidikan berbasis islam yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sejak awal pendiriannya dikhususkan untuk masyarakat miskin. Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo menerapkan program pendidikan gratis untuk anak-anak dari kalangan yang tidak mampu terutama anak-anak yatim, dhuafa, dan masakin. Anak-anak dari kalangan ekonomi bawah tersebut diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan gratis, mulai dari pendidikan non formal hingga formal.

Pemberian pendidikan gratis tersebut diberikan kepada anak-anak yatim, dhuafa dan masakin atau anak dari golongan miskin dengan syarat anak tersebut mempunyai keinginan untuk bersekolah dan menghafal Al-Quran. Berdasarkan data di lapangan yang penulis paparkan pada bab tiga dalam

tulisan ini, bahwa alumni lulusan Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo yang berasal dari kalangan masyarakat marjinal dinyatakan berhasil dalam menempuh pendidikan di pesantren tersebut. Beberapa dari mereka berhasil mencapai mobilitas sosial vertikal naik dari anak yang berasal dari ekonomi golongan bawah menjadi pengajar atau guru di Pesantren Darul Quran Lantaburo dan bahkan di pesantren-pesantren di Indonesia.

Meskipun menerapkan pendidikan gratis, namun Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo tetap memberikan pendidikan yang komprehensif melalui pendidikan formal dan non formalnya. Adapun dana pendidikan yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam mendanai pendidikan di pesantren berasal dari donasi para donatur, sumbangan dari pesantren-pesantren lain, serta subsidi silang dari santri yang berasal dari keluarga yang terbilang mampu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membatasi permasalahan penelitian, tujuannya agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat lebih fokus dan juga lebih mempermudah penulisan. Permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana upaya Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam memberikan pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin?
2. Bagaimana implikasi dari pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk dapat mendeskripsikan lebih jauh mengenai peran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburodalam membuka pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin, serta dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan upaya Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburodalam memberikan pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi dari pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk pengembangan ilmu Sosiologi, khususnya dalam permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan yang dilihat dari kajian sosiologi pendidikan. Hal tersebut berfungsi untuk melihat peran lembaga dalam membuka pemerataan kesempatan pendidikan terutama bagi kalangan masyarakat marjinal. Serta penelitian ini juga dapat menambah wawasan mengenai konsep filantropi dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat terutama pesantren.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik sama tentang pemerataan kesempatan pendidikan untuk menjadi bahan kajian pustaka dalam penyusunan penelitian.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca mengenai upaya pemerataan kesempatan pendidikan serta implikasi yang dihasilkan dari upaya tersebut.
3. Dari hasil penelitian mengenai peran pesantren dalam pemerataan kesempatan pendidikan, penulis berharap dapat memberikan masukan kepada lembaga- lembaga yang berwenang dalam bidang pendidikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan khususnya bagi masyarakat marjinal.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai implikasi yang dihasilkan dari upaya pemerataan kesempatan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Untuk membantu proses penelitian, peneliti menggunakan beberapa literatur atau bahan kajian pustaka yang dianggap relevan dan dapat membantu proses penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, yaitu tentang pemerataan kesempatan pendidikan yang dilakukan oleh pesantren atau lembaga pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat.

berikut ini adalah beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya yang dapat membantu proses penelitian yang dilakukan.

Pertama, ditulis oleh Ta'rif dalam bentuk Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Vol. 14 No.2 Agustus pada tahun 2016 dengan judul *Pesantren dan Anak Jalanan (Studi Penyelenggaraan Dikterapan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok)*.⁷ Dalam penelitiannya, Ta'rif mendeskripsikan bahwa kurangnya layanan pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan pada kelompok marjinal memunculkan berbagai macam permasalahan sosial di masyarakat khususnya pada anak. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agama RI menyelenggarakan program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) melalui lembaga keagamaan berasrama, yakni pesantren. Pesantren dianggap sebagai tempat yang paling cocok untuk mendidik anak-anak dari kaum marjinal. Pendidikan pesantren dianggap bersifat disintegrasi dan komprehensif dalam mendidik anak-anak jalanan atau kaum marjinal.

Penelitian Ta'rif menggunakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan informan di lapangan, sehingga dapat membantu penulis untuk menganalisis penyelenggaraan Dikterapan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok dan apa saja faktor penghambat dan pendorong keberlangsungan program tersebut. Penulis juga menggunakan model CIPP (Context, Input, Process,

⁷Ta'rif, *Op.Cit.*, hlm. 191.

Product) yaitu suatu model yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada pemegang keputusan guna membantu dalam pembuatan keputusan.⁸ Yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Ta'rif dengan penelitian penulis adalah penelitian Ta'rif lebih membahas program Diketrampilan yang merupakan program pemerintah, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada peran pesantren sebagai lembaga pendidikan islam yang didirikan oleh masyarakat dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas pesantren sebagai penyelenggara pendidikan bagi kaum miskin.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Aan Nasrullah dalam bentuk Jurnal *Studia Islamika* Vol.12, No.1 Juni pada tahun 2015 dengan judul *Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa*.⁹ Nasrullah mendeskripsikan bahwa penduduk Indonesia yang 85% adalah masyarakat muslim memiliki potensi sumber dana filantropi yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak dhuafa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Untuk mengelola dana tersebut dibutuhkan lembaga-lembaga khusus yang dapat menyalurkan dana filantropi kepada anak-anak dhuafa yang membutuhkan.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yakni BMH cabang

⁸*Ibid.*, hlm. 191.

⁹Aan Nasrullah, *Op.Cit*, hlm. 35.

Malang. Penulis memfokuskan membahas pengelolaan dan pendistribusian dana filantropi khusus dalam bidang pendidikan. Adapun pengelolaan dana filantropi untuk pendidikan anak dhuafa disalurkan melalui tiga program utama, yaitu: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa). Pendistribusian dana filantropi melalui tiga program utama tersebut dialokasikan dengan cara yang berbeda pada tiap-tiap program yang dijalankan. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, adalah Nasrullah lebih memfokuskan pada pengelolaan dana filantropi. Sedangkan, penulis dalam penelitiannya memfokuskan pada peran pesantren dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin yang juga pengelolaan dananya berasal dari dana filantropi. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan konsep filantropi dalam penggunaan dana pendidikan di pesantren.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Khoir dalam bentuk Jurnal Manajemen Pendidikan Islam volume 2, Nomor 1 pada tahun 2017 yang berjudul *Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam*.¹⁰ Dalam jurnalnya, Khoir mendeskripsikan bahwa manajemen merupakan aspek terpenting dalam mengelola lembaga/instansi termasuk lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Dengan

¹⁰Ahmad Khoir, 2017, Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam, dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 132.

manajemen atau pengelolaan yang baik, suatu lembaga dapat berjalan dengan semestinya. Manajemen dilakukan agar suatu proses berjalan dengan efisien dan efektif sehingga menghasilkan suatu hasil yang maksimal.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam menjawab permasalahan penelitiannya. Jurnal Khoir menyatakan bahwa sistem manajemen dalam pendidikan Islam merupakan proses yang koordinatif, sistematis dan integratif. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai pada pengawasan. Proses ini selalu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu sistem manajemen tersebut sekaligus mempunyai nilai material dan spiritual.¹¹ Hal tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa, sistem manajemen pendidikan Islam merupakan suatu pengaturan yang bersifat kerja sama, teratur dan menyeluruh dari mulai perencanaan, melaksanakan, hingga pengawasannya yang di dasari oleh nilai-nilai Islam. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khoir dengan penelitian penulis, yakni bahwa Khoir lebih memfokuskan penelitiannya pada kegiatan manajemen pesantren, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada peran yang dilakukan oleh pesantren dalam pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pesantren dan manajemennya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Humairah dalam tesisnya yang berjudul *Manajemen Pendidikan Sekolah Gratis Studi Kasus pada Yayasan*

¹¹*Ibid.*, hlm. 132.

Indonesia Juara sebagai Pengelola Pendidikan Gratis di SD Juara Jakarta Selatan pada tahun 2015.¹² Dalam tesis Humairah, dinyatakan bahwa dengan adanya kebijakan sekolah gratis, bukan berarti pendidikan gratis, karena sesungguhnya pendidikan tidak ada yang gratis. Walaupun biaya SPP terbilang gratis, namun dalam prakteknya tetap terjadi sebuah kendala dikarenakan kebutuhan sekolah tidak hanya sekedar gratis dalam biaya SPP di sekolah, namun lebih dari itu. Oleh karena itu diperlukannya bantuan pemerintah maupun swasta dalam memfasilitasi pendidikan yang dapat diakses oleh orang-orang miskin.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dalam menjawab permasalahan penelitiannya. Studi kasus yang diangkat oleh penulis adalah Manajemen pendidikan yang dilakukan Yayasan Indonesai Juara. Dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan SDM yang profesional dimulai dari proses evaluasi kebutuhan SDM, adanya evaluasi dan rekomendasi dari pihak yayasan yang kemudian dilakukan pelaksanaan oleh dua departemen dengan mekanisme pelayanan yang terpadu.¹³ Proses rekrutmen guru mempunyai alur yang tidak sembarangan dalam menerima SDM namun dilakukan dengan proses yang teratur dan selektif. Hal inilah

¹²Humairah, 2015, *Manajemen Pendidikan Sekolah Gratis Studi Kasus pada Yayasan Indonesia Juara sebagai Pengelola Pendidikan Gratis di SD Juara Jakarta Selatan*, Tesis Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana, Jakarta: Perpustakaan UNJ, hlm. 90.

¹³*Ibid.*, hlm. 90.

yang membuat siswa-siswa di lembaga pendidikan tersebut menjadi berkualitas. Karena peran guru merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan pendidikan. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Humairah yakni, Humairah berfokus pada manajemen sekolah gratis, sedangkan penulis lebih berfokus pada peran pesantren dalam pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pemberian pendidikan gratis untuk masyarakat miskin.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh C. Seshadri dalam jurnal *Comparative Education* pada tahun 2015 yang berjudul *Equality of Educational Opportunity some issues in Indian education*.¹⁴ Penulis menyatakan kunci dasar pendidikan di masyarakat yang demokratis dan sosialis adalah penekanan pada pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan merupakan suatu isu yang universal dalam dunia pendidikan internasional. Isu pemerataan kesempatan pendidikan menjadi kontroversial di setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kebijakan-kebijakan dan hambatan tersendiri yang harus diupayakan dalam pemerataan peluang pendidikan.

Komisi pendidikan India telah menyarankan pelaksanaan tindakan-tindakan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan kesempatan

¹⁴C, Seshadri, 2015, Equality of Educational Opportunity Some Issues in Indian Education, *Journal Comparative Education*, 12:3, hlm. 42.

pendidikan seperti, penghapusan biaya pendidikan, program beasiswa yang memadai, penyediaan buku gratis, alat tulis, seragam sekolah, makanan, transportasi, Fasilitas Hostel, hari belajar pusat dan pembinaan khusus bagi masyarakat marginal agar mereka dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan kekurangan lainnya. Terkadang mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang radikal, seperti memperkenalkan konsep pemerataan kesempatan pendidikan. Cara-cara yang dilakukan antara lain dengan mengusulkan penekanan konsumsi yang berlebihan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat miskin, melalui ketentuan jaminan kerja di upah yang wajar dan pemeliharaan sistem distribusi umum besar barang pokok yang penting. Adapun perbedaan penulis dengan jurnal tersebut adalah C. Seshadri lebih memfokuskan penelitiannya pada ruang lingkup negara India, sedangkan penulis berfokus pada peran pesantren dalam pemerataan akses pendidikan yang berada di wilayah Indonesia. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan konsep pemerataan kesempatan pendidikan.

Secara lebih lanjut persamaan dan perbedaan kelima tinjauan pustaka tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, akan dijabarkan secara detail dalam tabel berikut:

Tabel I.2 Perbandingan Telaah Pustaka

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ta'rif	Pesantren dan Anak Jalanan (Studi Penyelenggaraan Dikterapan di Pesantren Fathul Khair Cimanggis Depok)	Kualitatif	Menjelaskan tentang pemberian akses pendidikan bagi kaum miskin oleh pesantren	lebih berfokus pada program Diketrapan oleh pesantren
2	Aan Nasrullah	Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa	Kualitatif	Sama-sama menggunakan konsep filantropi dalam penggunaan dana pendidikan di pesantren	Nasrullah lebih memfokuskan pada pengelolaan dana filantropi
3	Ahmad Khoir	Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam	Kualitatif	Sama-sama membahas peran manajemen pesantren yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berhasil	Khoir lebih memfokuskan penelitiannya pada kegiatan manajemen pesantren
4	Humairah	Manajemen Pendidikan Sekolah Gratis Studi Kasus pada Yayasan Indonesia Juara sebagai Pengelola Pendidikan Gratis di SD Juara Jakarta Selatan	Kualitatif	Sama-sama membahas pemberian pendidikan gratis untuk masyarakat miskin	Humairah lebih berfokus pada kegiatan manajemen pendidikan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	C. Seshadri	Equality of Educational Opportunity some issues in Indian education	Kualitatif	Sama-sama menggunakan konsep pemerataan kesempatan pendidikan.	memfokuskan penelitian pada ruang lingkup negara India dan kebijakan pemerintah india untuk mengatasi permasalahan pendidikan

(Sumber : Diolah oleh penulis dari tinjauan penelitian, 2018)

Berdasarkan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang memperkuat penelitian yang sudah ada. Penulis melakukan penelitian peran lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam memberikan pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin dengan menggunakan konsep pemerataan kesempatan pendidikan atau *equality of educational opportunity* serta konsep pendukung lainnya.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang diambil untuk penelitian ini, penulis dapat mengambil informasi yang relevan dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan terhadap peran pesantren dalam pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo. Kelima literatur tersebut kemudian dapat membantu penulis dalam merangkai penyusunan skripsi yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis juga mendapatkan beberapa konsep terkait dengan konsep pesantren, filantropi islam, dan pemerataan kesempatan pendidikan serta memperoleh

gambaran mengenai teknik-teknik dalam penulisan dan menganalisis data secara tepat dan juga menuliskan ide-ide dan hasil penelitian yang relevan.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing dalam Jalal dan Supriadi 2001, merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, bahwa dana yang didapatkan oleh pesantren untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan, merupakan dana filantropi yang berasal dari masyarakat dan donatur. Oleh karena itu keberlangsungan lembaga pendidikan pesantren sangat bergantung pada masyarakat.

Secara etimologi, pesantren berasal dari kata “pesantren” dengan kata dasar “santri” yang berasal dari Bahasa Tamil yang memiliki arti “guru mengaji”. Menurut Dhofier, kata pesantren berasal dari kata “santri” yang kemudian diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat tinggal santri atau siswa. Di luar pulau Jawa institusi pendidikan ini disebut dengan nama lain, seperti *surau* (di Sumatera Barat), *dayah* (di Aceh) dan *pondok* (di

¹⁵Toto Suharto, 2005, *Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Cakrawala Pendidikan, XXIV, No 3, hlm. 333.

daerah lain).¹⁶ Dengan demikian berdasarkan pengertian yang berbeda dan dengan penyebutan nama pesantren yang berbeda pula di setiap daerah, pesantren tetap memiliki makna sebagai tempat santri atau siswa untuk belajar mengaji.

Sebagai suatu lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri dari lembaga pendidikan lainnya yang ada di masyarakat, Pesantren memiliki empat komponen pokok yang selalu ada pada setiap pondok pesantren, yaitu :

- a. Kiai sebagai pemimpin, pendidik, guru, dan panutan : kiai dikenal sebagai guru atau pendidik utama di pesantren. Tugas kiai adalah memberikan bimbingan, pengarahan, dan pendidikan kepada para santri. Kiai juga dijadikan sebagai figur ideal santri dalam proses pengembangan diri. Dapat dikatakan juga kiai merupakan komponen yang paling penting di dalam pesantren, karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya suatu pesantren sangat bergantung pada kemampuan kiai.¹⁷
- b. Santri sebagai peserta didik atau siswa : santri adalah peserta didik yang belajar untuk menuntut ilmu di pesantren. Jumlah santri biasanya dijadikan tolak ukur sejauh mana pesantren telah berkembang.¹⁸

¹⁶Mohammad Mustari, 2011, *Peran Pesantren Dalam Pembangunan Pendidikan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Multipress, hlm.3.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 37.

¹⁸*Ibid.*,

- c. Masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan peribadatan : masjid merupakan tempat paling strategis untuk mendidik para santri. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pondok pesantren merupakan manifestasi universalitas sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini, ia mengadopsi sistem pendidikan Islam sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan masjid sebagai pusatnya.¹⁹
- d. Pondok sebagai asrama untuk mukim santri : keberadaan pondok atau asrama merupakan ciri khas utama dari tradisi pesantren. Hal ini yang membedakan pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, di mana para santri tinggal dan belajar bersama di bawah bimbingan seorang kiai.²⁰

Adapun undang-undang yang mengatur tentang praktik dan penyelenggaraan pesantren dijelaskan dalam undang-undang berikut :

“...Dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 peraturan dan pelaksanaan pesantren telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal. Selain itu, dua kebijakan yang berkaitan langsung dengan pesantren telah ditetapkan sebelumnya, yaitu : (1) kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan (2) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Binbaga Islam Departemen Pendidikan Nasional Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar...²¹

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*,

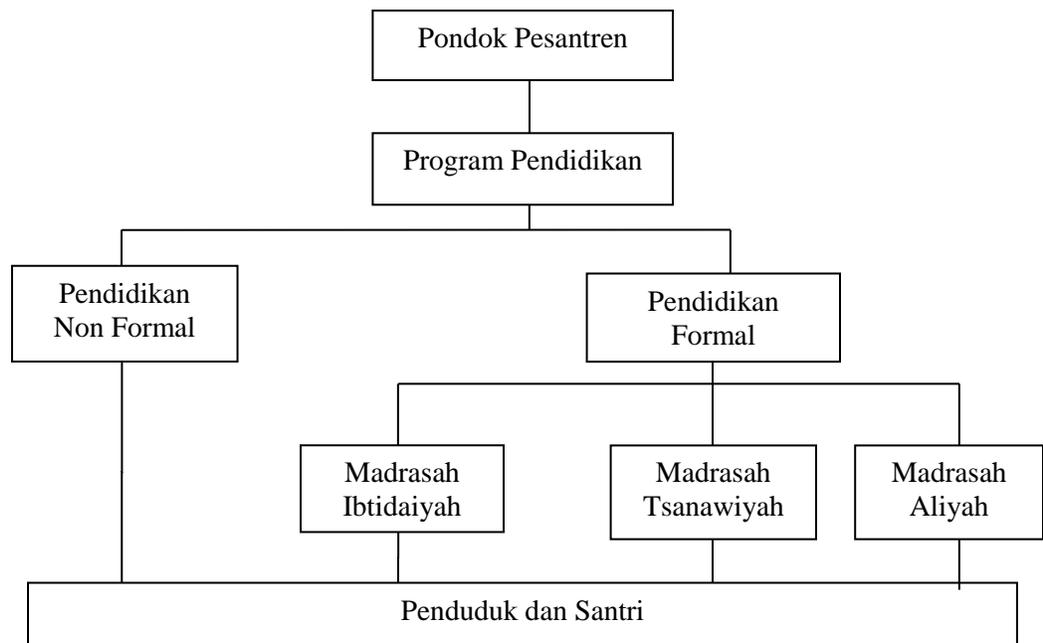
²¹*Ibid.*, hlm. 40.

Seiring perkembangannya, pesantren telah bertransformasi, yang semula merupakan lembaga pendidikan tradisional dan kini mengalami modernisasi. Pola inovasi pada pesantren dalam proses perkembangannya, berupa inovasi pendidikan keterampilan, penyetaraan program pendidikan, dan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang ditawarkan sekaligus dikelola oleh Departemen Agama (Kementerian Agama) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.²² Berdasarkan hal tersebut pesantren kini memiliki sistem pendidikan atau pembelajaran yang lebih lengkap, bukan hanya mendidik santri secara nonformal melalui pengajian yang diadakan di pesantren, tetapi juga dengan pemberian pendidikan formal bagi santri. Bukan hanya itu saja, pesantren juga memberikan pendidikan keterampilan, penyetaraan program pendidikan bagi para santri, sehingga seluruh kemampuan dan bakat para santri dapat di kembangkan lebih jauh lagi.

Dengan sistem pendidikan yang diadakan oleh pesantren, tentu membantu masyarakat dalam hal pemberian pelayanan pendidikan khususnya pendidikan yang bercorak nilai-nilai Islam. Adapun skema sistem pelayanan pesantren untuk program pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

²²*Ibid.*, hlm. 51

Skema I.1 Pelayanan Pesantren Untuk Program Pengembangan Pendidikan Masyarakat



(Sumber : Mohammad Mustari, *Peran Pesantren Dalam Pembangunan Pendidikan Masyarakat Desa*, 2011)

Berdasarkan skema I.1 di atas, kita dapat menganalisis bahwa pesantren melakukan program pendidikan bagi masyarakat. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pesantren berupa kegiatan-kegiatan keagamaan di pesantren. Sedangkan, Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pesantren berupa pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau yang setara dengan pendidikan dasar, Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan pendidikan menengah, dan Madrasah Aliyah atau yang setara dengan pendidikan menengah atas. Penyelenggaraan

pendidikan yang dilakukan oleh pesantren memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan di masyarakat. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan bagi para santri saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar di luar pesantren tersebut.

1.6.2. Mobilisasi Filantropi Islam

Filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani yakni *philos* yang berarti ‘cinta’ dan *anthropos* yang berarti ‘manusia’. Cinta kepada manusia berbentuk dalam pemberian derma kepada orang lain, khususnya yang bukan sanak keluarga sendiri. Filantropi dalam pemberian derma bisa juga digunakan dengan istilah lain yakni karitas (*charity*). Namun, di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, terdapat kecenderungan untuk membedakan antara filantropi dengan karitas. Filantropi lebih berkonotasi kedermawanan yang memiliki orientasi pemberdayaan jangka panjang dan dilakukan secara berkesinambungan, sementara karitas lebih bersifat santunan.²³

Nasrullah menjelaskan pengertian mengenai konsep filantropi sebagai berikut :

“...Secara estimologi, makna filantropi (*philantropy*) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktek member (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai apresiasi cinta...”²⁴

²³Irfan Abubakar dan Chaider, S. Bamualim, 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC, hlm. 5.

²⁴Aan Nasrullah, *Op.Cit.*, hlm.3.

Setidaknya terdapat dua produk undang-undang yang mengatur filantropi Islam yaitu Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Zakat dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.²⁵ Dengan adanya dua undang-undang yang mengatur filantropi Islam khususnya yang mengatur zakat dan waqaf tersebut membawa perubahan penting. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut membantu mewujudkan tertib hukum pengelolaan filantropi Islam.

Tradisi yang sudah berlangsung sejak lama ini bukan hanya mencerminkan suatu bentuk ketaatan dalam beragama, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat muslim dari segi sosial, budaya, dan politik.²⁶ Adapun dana filantropi yang dihasilkan dari kedermawanan masyarakat dapat digunakan untuk perkembangan masyarakat, yang salah satunya adalah dana untuk pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari golongan miskin. Dana filantropi yang berasal dari masyarakat sendiri dapat membantu mewujudkan keadilan sosial yang dalam hal ini adalah keadilan dalam memperoleh pendidikan khususnya pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari golongan miskin.

Filantropi dalam Islam merupakan suatu bentuk kebajikan hakiki yang terwujud dalam berbagai sikap dan tindakan yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia lainnya. Adapun dimensi sosial kebijakan yang hakiki ini mencakup semua perbuatan baik yang dilakukan kepada ibu-

²⁵*Ibid.*, hlm. 214.

²⁶Irfan Abubakar, Chaider, S. Bamualim, *Op.Cit.*, hlm. 6.

bapak, sanak saudara, anak-anak yatim, dan fakir miskin. Lebih jauh ditekankan bahwa kebajikan hakiki bukanlah dengan mengedepankan simbolisme ibadah, melainkan dengan aksi-aksi nyata seperti memberikan santunan kepada fakir miskin ataupun lebih jauh melakukan pemberdayaan kaum yang lemah.²⁷

Salah satu bagian penting dari organisasi filantropi adalah penggalangan dana. Sumber dana bergantung pada diterapkan atau tidaknya manajemen modern di dalam organisasi filantropi. Pada konteks ini pengujian praktik manajemen organisasi filantropi modern, yang mencakup administrasi (pencatatan dan laporan neraca keuangan), korespondensi (pendataan, sistem komunikasi, dan arsip), pelatihan staf, rencana kerja, penghargaan dan sanksi. Adapun metode yang paling umum dalam penggalangan dana filantropi adalah melalui masjid-masjid dan perkumpulan keagamaan.²⁸

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa penyaluran dana filantropi lebih nerorientasi kepada tujuan karitatif, padahal seharusnya ia diarahkan kepada pengembangan ekonomi yang dapat membantu kemandirian mustahik. Sejumlah kecil organisasi telah mengembangkan program-program inovasi yang produktif. Misalnya program swasembada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa, Kelompok Usaha Bersama dan lain-lainnya.

²⁷*Ibid.*, hlm. 45.

²⁸*Ibid.*, hlm. 228.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dana filantropi yang merupakan dana sumbangan sosial, kedermawanan, dan kemurahan masyarakat digunakan bagi pengembangan pendidikan di masyarakat, yang khususnya dalam penelitian ini adalah pesantren. Upaya pesantren dalam memberikan pemerataan kesempatan pendidikan menggunakan dana filantropi yang diberikan oleh donatur. Pesantren kemudian memobilisasi dan mengelola dana filantropi sebagai bentuk upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan pemerataan kesempatan pendidikan khususnya bagi masyarakat marjinal.

1.6.3. Pendidikan Gratis Sebagai Upaya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Pemberian pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membuka akses pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat marginal. Dalam konsep pemerataan kesempatan pendidikan, studi yang secara langsung mengarah pada analisis kebijakan dalam pemerataan pendidikan ialah studi yang dilakukan oleh James Coleman pada tahun 1968 yang berjudul *Equity & Excellence in Education*. Pendidikan merupakan kunci dari pembangunan setiap negara. Coleman menyatakan bahwa kesetaraan peluang pendidikan merupakan pemberian akses untuk mencapai pendidikan bagi semua kalangan

masyarakat.²⁹ Studi ini merupakan jawaban terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia Amerika Serikat No. 402/1964, yang memerintahkan kepada Komisi Pendidikan untuk melaksanakan suatu survei dan melaporkan hasilnya kepada presiden dan kongres dalam kurun waktu dua tahun.³⁰ Melalui studi yang dilakukan oleh James Coleman yang berfokus pemerataan kesempatan dalam pendidikan, memberikan pengaruh pada kebijakan-kebijakan dalam pendidikan yang diambil oleh Amerika Serikat pada saat itu. Studi tersebut juga menjadi dasar atas pengembangan studi-studi selanjutnya dalam bidang pendidikan.

Coleman juga menyatakan bahwa konsep kesetaraan kesempatan pendidikan didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk penyetaraan manfaat antara siswa atau pemberian akses penuh ke dalam pendidikan. Coleman juga berpendapat bahwa kondisi sosial ekonomi dan latar belakang keluarga merupakan faktor penting yang mendorong sebagian besar perbedaan dalam prestasi siswa.³¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kesetaraan kesempatan pendidikan berorientasi secara penuh untuk melakukan penyetaraan manfaat dan akses penuh terhadap pendidikan

²⁹ Donald B. Holsinger dan W. James Jacob, 2009, *Inequality In Education Comparative and International Perspectives*, Faculty of Education The University of Hong Kong Pokfulam Road, Hong Kong, China, hlm: 5.

³⁰James S. Coleman, 1968, *Equality Of Educatinal Opportunity, Equity & Excellence in Education*, (6:5, 19-28, hlm. 20, DOI: 10.1080/0020486680060504), diakses melalui <http://dx.doi.org/10.1080/0020486680060504> pada tanggal 20 Maret 2019.

³¹Rajius Idzalika dan Maria C. Lo Bue, 2015, *Inequality of opportunity in education: Evidence from Indonesia, 1997-2007*, hlm : 4, diakses melalui <http://www.siecon.org/online/wp-content/uploads/2015/10/Lo-Bue.pdf> pada tanggal 30 Juli 2019.

bagi seluruh lapisan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi dan latar belakang keluarga merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh pada prestasi siswa di sekolah.

Survei Coleman tersebut menemukan bahwa keadaan sekolah-sekolah, baik bagi kulit putih maupun kulit hitam tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Hal ini berarti bahwa mutu, sarana, prasarana, dan guru-guru tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara sekolah-sekolah orang yang berkulit putih dengan kulit hitam. Disamping itu, faktor-faktor sekolah sangat kecil pengaruhnya terhadap prestasi belajar akademis siswa.³² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan sekolah antara sekolah bagi kulit putih dengan kulit hitam tidak menunjukkan perbedaan yang dapat berpengaruh pada prestasi belajar akademis siswa.

Beberapa poin yang menonjol dalam survey yang dilakukan oleh James Coleman adalah yang pertama jelas bahwa latar belakang keluarga masing-masing memiliki peran penting dalam pencapaian anak. Aspek-aspek dalam perbedaan latar belakang keluarga yang mempengaruhi pencapaian anak diantaranya adalah tingkat ekonomi keluarga, kondisi di rumah, dan pendidikan orang tua.³³ Perbedaan latar belakang keluarga dianggap berpengaruh dalam pencapaian anak di sekolah. Adapun aspek-aspek yang

³² *Ibid.*, hlm. 21.

³³ *Ibid.*,

berpengaruh yaitu perbedaan tingkat ekonomi keluarga, perbedaan kondisi rumah, dan perbedaan pendidikan orang tua.

Studi yang dilakukan oleh Coleman berhasil membedakan secara konseptual pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif, dengan pemerataan pendidikan secara aktif. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerataan secara pasif lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah.³⁴ Dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif dijelaskan oleh James Coleman adalah suatu kondisi dimana setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendaftar di sekolah.
- b. Pemerataan aktif ialah kesempatan yang sama yang diberikan oleh sekolah kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.³⁵ Dalam hal ini pemerataan kesempatan pendidikan aktif lebih menekankan pada pemberian kesempatan kepada seluruh murid yang terdaftar pada sebuah sekolah untuk mendapatkan prestasi belajar yang sama dan setinggi-tingginya.

Konsep pemerataan kesempatan pendidikan kemudian terus berkembang dan berevolusi. Komponen-komponen konsep pemerataan pendidikan secara lebih jelas diungkapkan oleh Schiefelbein & Farrell dalam

³⁴Ace Suryadi, HAR, Tilaar, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

³⁵*Ibid.*, hlm. 31.

studinya di Chile yang berjudul *Eight Years of Their Life through Schooling to the Labor Market*. Dalam studinya Schiefelbein & Farrell menggunakan landasan konsep pemerataan pendidikan yang relatif lebih komprehensif daripada konsepsi pemerataan pendidikan yang digunakan oleh James Coleman.³⁶

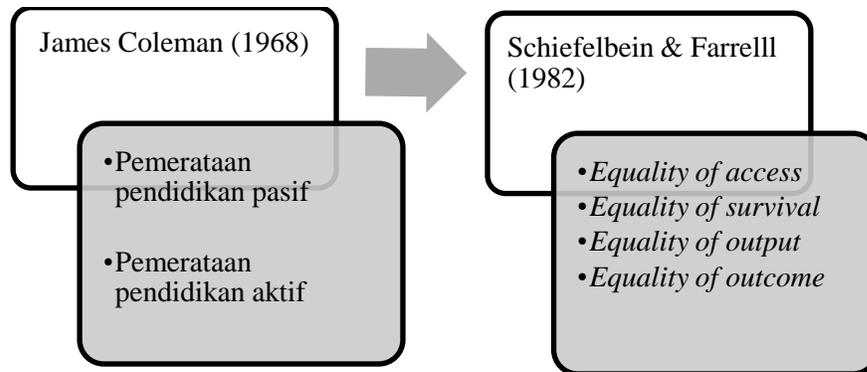
Berdasarkan konsep yang digunakan oleh Schiefelbein & Farrell dalam studinya, pemerataan pendidikan atau *equality of educational opportunity* tidak hanya terbatas pada, apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki sekolah atau yang Coleman sebut sebagai pemerataan pendidikan secara pasif, tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama dalam suatu sekolah. Mereka harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk sekolah, belajar di sekolah, lulus, sampai dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan di masyarakat.³⁷

Konsep pemerataan kesempatan pendidikan berdasarkan beberapa studi yang dilakukan mengalami evolusi dan perkembangan menjadi lebih komprehensif. Berikut merupakan skema perkembangan konsepsi tentang pemerataan pendidikan:

³⁶*Ibid.*,

³⁷*Ibid.*, hlm. 32.

Skema I.2 Perkembangan Konsep Pemerataan Kesempatan Pendidikan



(Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2018)

Berdasarkan skema I.2 di atas, konsep pemerataan pendidikan yang ditemukan oleh Coleman dalam studinya, menemukan bahwa konsep pemerataan kesempatan pendidikan terbagi menjadi dua, yakni pemerataan pendidikan secara pasif dan pemerataan pendidikan aktif. Kemudian konsep pemerataan pendidikan dikembangkan secara lebih terperinci oleh Schiefelbein & Farrell ke dalam empat konsep pemerataan pendidikan sebagai berikut :

a. *Equality of access*

Equality of access atau kesetaraan dalam akses pendidikan memungkinkan anak-anak dari kelompok sosial yang berbeda masuk ke dalam sistem sekolah. Menyadari bahwa jutaan anak di negara-negara miskin tidak memiliki kesempatan untuk masuk sekolah, dan bahwa mereka yang melakukannya biasanya adalah keturunan dari kelompok yang disukai secara ekonomi, geografis, rasial, atau suku, pembuat kebijakan

pendidikan selama 1960-an berupaya menyediakan tempat sekolah yang cukup untuk setiap anak untuk memiliki akses ke sekolah.³⁸ Konsep ini berkaitan erat dengan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal ini setiap anak dari kalangan yang berbeda, khususnya anak-anak dari golongan miskin diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendaftar dan memasuki sekolah.

b. Equality of survival

Kesetaraan bertahan dalam pendidikan atau equality of survival menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan. Bahkan jika kita mengasumsikan bahwa semua anak memiliki kemungkinan yang sama untuk masuk sekolah, anak-anak dari kelompok sosial yang berbeda memiliki kemungkinan yang berbeda untuk bertahan dalam sistem. Dalam masyarakat berkembang, tingkat ketidaklengkapan, sering didahului dengan pengulangan kelas, sangat tinggi.³⁹ Konsep ini berkaitan dengan keberlanjutan anak di sekolah. Keberlanjutan anak di sekolah dikaitkan dengan tingkat pengulangan atau tinggal kelas di sekolah dan tingkat putus sekolah.

³⁸Ernesto Schiefelbein Joseph P. Farrell, 2016, *Eight Years of Their Lives Through Schooling To The Labour Market In Chile*, International Development Research Centre, hlm. 12.

³⁹*Ibid.*, hlm. 12.

c. *Equality of output*

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar atau *equality of output* dilihat dari sudut pandang perseorangan, hal ini menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan keterampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan perbedaan suku bangsa, daerah, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Konsep output pendidikan biasanya di ukur dengan prestasi belajar akademis.⁴⁰

Anak-anak tentu saja dapat belajar banyak hal dari pengalaman mereka bersekolah, baik sebagai konsekuensi dari pengajaran yang dimaksudkan atau kehadiran mereka di lembaga dengan karakteristik organisasi tertentu, tetapi apa pun yang dipelajari, itu dapat dipelajari ke tingkat yang berbeda oleh berbagai kelompok anak. Bahkan jika semua anak memiliki kemungkinan yang sama untuk bertahan hidup sampai akhir siklus pendidikan yang diberikan, perbedaan tingkat pembelajaran mereka di sebagian besar masyarakat berkembang memiliki efek kritis terhadap akses mereka ke siklus berikutnya.⁴¹

d. *Equality of outcome*

Pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat atau *equality of outcome*. Konsep ini

⁴⁰Ace Suryadi, HAR, Tilaar, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁴¹Ernesto Schiefelbein Joseph P. Farrell, *Op.Cit.*, hlm. 13.

menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan dengan penghasilan lulusan (individu), jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja (masyarakat), dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi (masyarakat).⁴²

Sudah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir untuk berpendapat bahwa jika suatu sistem memiliki kesetaraan akses, kelangsungan hidup, dan hasil, mencapai tingkat pendidikan yang relatif tinggi tidak akan selalu menghasilkan manfaat yang sama di pasar tenaga kerja untuk anak-anak miskin seperti untuk anak-anak orang kaya.⁴³

Dengan memahami konsep tentang pemerataan kesempatan dalam pendidikan, dapat diketahui bahwa kebutuhan untuk mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran merupakan kebutuhan setiap orang. Dengan keberadaan dunia pendidikan dapat dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari sekolah. Terutama untuk masyarakat yang berasal dari golongan miskin.

1.6.4. Masyarakat Miskin Sebagai Masyarakat Marginal

Kemiskinan didefinisikan oleh Levitan dalam Suyatno 2001 sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk

⁴²Ace Suryadi, HAR, Tilaar, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁴³Ernesto Schiefelbein Joseph P. Farrell, *Op.Cit.*, hlm. 13.

mencapai suatu standar hidup yang layak.⁴⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang kesulitan dalam mencapai suatu standar hidup yang layak yang disebabkan oleh kurangnya pemenuhan akan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan taraf hidup. Salah satu pelayanan yang dirasa kurang bagi masyarakat miskin adalah pelayanan akan pendidikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amartya Sen dalam Rahmat 2014 yang menyatakan bahwa, kemiskinan terkait dengan kesempatan yang minim yang tersedia bagi orang miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya.⁴⁵ Melalui kesempatan yang minim khususnya dalam bidang pendidikan, kaum miskin atau masyarakat miskin tidak dapat mengembangkan diri melalui pendidikannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini pendidikan dianggap mampu meningkatkan kualitas hidup seseorang terutama bagi masyarakat miskin.

Pendidikan dapat menjadi jalan atau rute untuk melakukan mobilitas sosial yang lebih besar dan jalan keluar dari kemiskinan bagi masyarakat marjinal. Pendidikan juga memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Pendidikan dapat memperluas kebebasan orang-orang dalam memilih dan bertindak, memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan

⁴⁴Bagong Suyatno, 2001, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dalam *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, nomor 4, hlm. 29.

⁴⁵Abdi Rahmat, *Op.Cit.*, hlm. 34.

sosial dan politik masyarakat mereka dan melengkapi mereka dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan mata pencaharian mereka.⁴⁶

Adapun karakteristik untuk orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalisasikan dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang dengan identitas sosial dan status yang rendah

Status yang rendah merupakan unsur intrinsik dalam marginalisasi. Di bagian Asia Selatan, praktek-praktek sosial yang berkaitan dengan status kelompok sering didasarkan pada ide-ide yang kompleks tentang kasta. Sementara diskriminasi berdasarkan kasta dilarang dalam undang-undang, Praktek dan sikap yang mendasari yang sering sulit untuk berubah. Satu kesimpulan dapat diambil untuk anggota kelompok yang berstatus sosial rendah adalah bahwa kemiskinan mengambil peran besar dalam melestarikan kerugian pendidikan. Namun, komponen non-kemiskinan yang lebih besar berasal dari perbedaan suku karena diskriminasi sosial dan budaya.⁴⁷

2. Peranan penting dari bahasa

Bahasa dan etnis sangat berhubungan. Memiliki bahasa yang khas adalah elemen penting dari identitas pribadi dan kelompok. Orang-orang yang tidak dapat berbicara bahasa negara dominan mungkin memiliki

⁴⁶Kevin Watkins, 2010, *Reaching the marginalized*, United Nations Educational, Oxford Univesity Press, hlm. 135.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 172.

kurangan akses ke sumber-sumber tertulis dan lisan, membatasi kesempatan mereka untuk pekerjaan dan melakukan mobilitas sosial. Orang tua yang tidak berbicara bahasa resmi di mana anak-anak mereka bersekolah mungkin memiliki lebih sedikit kesempatan untuk terlibat dengan guru dan orang-orang yang memegang otoritas pendidikan.

Anak-anak mereka tidak dapat memahami apa yang diajarkan jika guru tidak berbicara bahasa rumah mereka. Ketidaksetaraan dihasilkan dalam kesempatan adalah faktor utama dalam marginalisasi di negara di mana etnis dan bahasa yang sangat terkait dengan deprivasi sosial. Dalam hal ini banyak anak-anak pribumi tidak memiliki akses ke pendidikan bilingual antar budaya⁴⁸

3. Lokasi dan tempat tinggal

Anak-anak yang tinggal di daerah kumuh, daerah pedesaan terpencil atau zona yang terkena dampak konflik biasanya merupakan anak-anak yang paling miskin dan paling rentan dalam masyarakat. Mereka tinggal di daerah paling terbatasnya akses ke layanan dasar, termasuk pendidikan. Peluang pendidikan dan mata pencaharian yang dibatasi memperkuat jebakan kemiskinan. Bagian ini memandang kerugian yang berkaitan dengan lokasi yang melanggengkan marginalisasi dalam pendidikan.⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 172.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 175.

4. Daerah pedesaan terpencil

Anak-anak pedesaan yang berada pada wilayah terpencil memiliki risiko yang tinggi dalam marginalisasi pendidikan, terutama jika mereka miskin dan perempuan. Rural-urban membagi dalam pendidikan sering tumpang tindih dengan kesenjangan yang lebih luas. Di banyak negara, daerah pedesaan cenderung memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari kemiskinan dan kurang akses ke perawatan kesehatan.⁵⁰

5. Gaya hidup pastoralis

Tekanan mata pencaharian adalah faktor penting dalam gaya hidup pastoralis. Penggembala yang tidak selalu masyarakat pedesaan miskin, terutama jika aset ternak mereka diperhitungkan memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Tetapi mereka sering sangat bergantung pada anak laki-laki untuk menggembalakan ternak dan anak-anak perempuan untuk tugas-tugas domestik, hal tersebut membatasi waktu anak-anak yang tersedia untuk pendidikan formal.⁵¹

6. Anak-anak yang tinggal dalam wilayah konflik

Konflik dapat menghancurkan sekolah dan membuat risiko untuk murid dan guru. Selain itu, konflik dapat meninggalkan warisan ketidakpercayaan, ketidakstabilan dan tata-pemerintahan yang lemah yang ditemukan di banyak negara paling rapuh di dunia, dan pemerintah

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 176.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 177.

seringkali tidak mau untuk menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan.⁵²

7. Orang-orang yang mengalami disabilitas

Disabilitas adalah salah satu faktor yang paling terlihat, tetapi paling ampuh dalam marginalisasi pendidikan. Di luar efek kesehatan terkait langsung, gangguan fisik dan mental membawa stigma yang sering dasar untuk pengecualian dari masyarakat dan sekolah. Dampak ini sering buruk bagi masyarakat miskin. Orang-orang yang mengalami disabilitas dipandang sebagai memiliki kondisi yang membedakan mereka dari sisa masyarakat. Sikap itu memunculkan diskriminasi, isolasi dan stigmatisasi khususnya dalam bidang pendidikan.⁵³

8. Orang yang terkena HIV dan AIDS

HIV dan AIDS adalah yang utama dalam krisis kesehatan global, memiliki konsekuensi mendalam dan luas untuk pendidikan dan juga mengancam kehidupan. Anak-anak keluar dari sekolah dan mengorbankan pendidikan karena hal tersebut, HIV dan AIDS memperkuat masalah yang timbul dari kemiskinan dan diskriminasi sosial, seperti tekanan ekonomi, dan stigmatisasi.⁵⁴

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Novrian Satria Perdana, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas

⁵² *Ibid.*, hlm. 178.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 185.

⁵⁴ *Ibid.*,

Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia” menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas bagi anak-anak di Indonesia diantaranya adalah : jenis kelamin anak, daerah tempat tinggal (perkotaan-pedesaan), tingkat pendidikan orang tua, jarak ke sekolah, usia perkawinan orang tua, dan pendapatan per kapita orang tua.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa faktor gender, lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan orang tua, dan pendapatan orang tua berpengaruh pada aksesibilitas anak-anak di Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Adapun arti penting pendidikan bagi orang miskin atau orang-orang yang termarginalisasikan dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Adalah Jembatan Perbaikan Kondisi

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dianggap dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Dengan pendidikan yang cukup, dapat dikatakan kita dapat hidup sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Pendidikan adalah acuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik.⁵⁶

2. Pendidikan Sebagai Harga Diri

Banyak orang rela melakukan apa pun agar mendapatkan kesempatan mengikuti proses pendidikan yang diharapkan. Orang-orang miskin terus

⁵⁵Novrian, Satria, Perdana, 2015, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia, Dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 21 Nomor 3, hlm.283.

⁵⁶Mohammad Saroni, *Op.Cit.*, hlm. 63.

berusaha untuk mengikuti proses pendidikan walaupun terkadang membuat kehidupan mereka kalang kabut. Bagi orang miskin, pendidikan memang telah menjadi semacam katrol yang diharapkan dapat mengangkat taraf kehidupan mereka. Dengan katrol ini tingkat kehidupan mereka, baik secara finansial maupun secara sosial dapat meningkat secara signifikan.⁵⁷

3. Masyarakat Adalah Sumber Kekuatan Bangsa dan Negara

Masyarakat yang tidak berkualitas akan menjadi beban bagi negara. Jika negara dibebani oleh kelompok orang yang tidak berkualitas, maka negara dan bangsa tidak dapat berkembang sebagaimana bangsa dan negara yang masyarakatnya berkualitas.⁵⁸

4. Mereka Butuh Perubahan

Orang-orang miskin berharap bahwa dengan mengikuti proses pendidikan, mereka mempunyai bekal untuk memperbaiki kondisi hidup, terutama perekonomian. Asumsi mereka memang sangat sederhana bahwa jika mereka mempunyai pengetahuan, mereka dapat memperoleh sumber penghasilan yang lebih baik. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, maka harus ada selebar kertas yang dinamakan ijazah. Oleh karena itu, sekolah menjadi sesuatu

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 67.

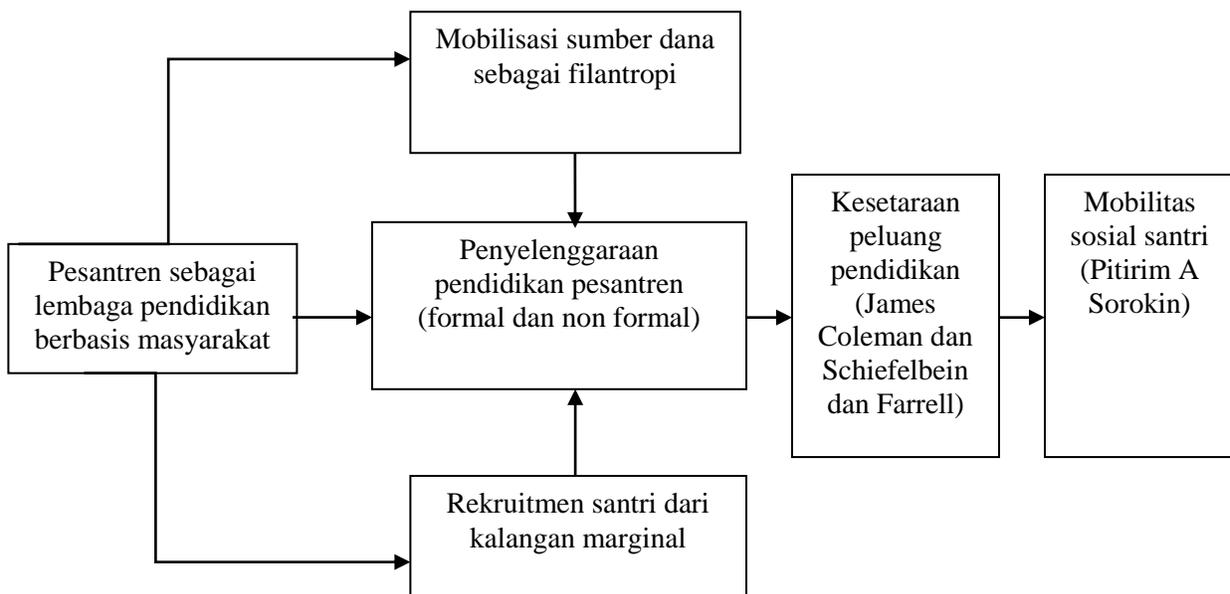
⁵⁸*Ibid.*, hlm. 71.

yang sangat penting. Dengan pendidikan tersebut, mereka berharap akan terjadi perubahan yang signifikan atas kondisi kehidupan mereka.⁵⁹

1.6.5. Hubungan Antar Konsep

Dari kerangka konsep yang dipaparkan, secara sederhana penulis membuat sebuah hubungan antar konsep studi ini pada pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang memberikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin. Adapun skema hubungan antar konsep pada studi ini adalah sebagai berikut:

Skema I.3 Hubungan Antar Konsep



(Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018)

Berdasarkan skema I.3 di atas, dapat dianalisis bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang bersifat mandiri dan dana penyelenggaraan pendidikannya berasal dari masyarakat. Dalam

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 74.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pesantren telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga keagamaan islam yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal. Ada pula dua kebijakan langsung mengenai pesantren yakni : (1) Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan (2) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Binbaga Islam Departemen Pendidikan Nasional Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Terkait dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren, banyak pesantren yang tidak melakukan pemumutan biaya bagi para santrinya yang berasal dari golongan masyarakat miskin, atau dengan kata lain pesantren menggratiskan biaya pendidikan bagi para santrinya yang berasal dari golongan tidak mampu. Sumber dana yang dimiliki oleh pesantren berasal dari dana filantropi. Dana filantropi sendiri merupakan dana yang berasal dari kedermawanan, kemurahan hati, sumbangan sosial, serta sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Dana filantropi diperoleh pesantren dari para donatur dan masyarakat sekitar yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan sistem pendidikan di pesantren.

Adapun perekrutan santri di pesantren sejak awal didirikannya, pesantren secara khusus merekrut santri yang berasal dari kalangan tidak mampu. Namun kini peminatnya semakin berkembang dan berasal dari berbagai macam kalangan. Dalam perekrutannya, pesantren tidak mempermasalahkan latar belakang sosial ekonomi calon santrinya. Asalkan calon santri memiliki keinginan untuk belajar ilmu agama dan sekolah, pihak pesantren secara sukarela menerima calon santrinya tersebut. Adapun pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, pertama melalui pendidikan formal, pendidikan formal yang dilakukan pesantren adalah melalui pendidikan di sekolah-sekolah yang juga berada di bawah naungan yayasan pesantren. Pendidikan non formal dilakukan melalui kegiatan pembelajaran keagamaan khas pesantren, serta kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengasah keterampilan serta bakat dan minat yang dimiliki oleh para santri.

Berdasarkan hal tersebut, Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dianggap sebagai lembaga yang berperan dalam membuka kesetaraan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin karena memenuhi dimensi-dimensi dalam pemerataan kesempatan pendidikan. Peran dalam pandangan Soerjono Soekanto ialah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

maka ia menjalankan suatu peranan.⁶⁰ Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif sebagai sebuah upaya untuk memberikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin terkait dengan perannya sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Coleman mendefinisikan konsep kesetaraan kesempatan pendidikan sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk penyetaraan manfaat pendidikan antar siswa atau pemberian akses penuh ke dalam pendidikan bagi siswa dari latar belakang yang berbeda.⁶¹ Dengan pemberian akses pendidikan bagi kaum miskin yang dilakukan oleh pesantren tentu saja memberikan banyak manfaat bagi masyarakat miskin tersebut. Pentingnya pendidikan untuk orang miskin adalah karena (1) pendidikan adalah jembatan perbaikan kondisi, (2) pendidikan sebagai harga diri (3) masyarakat adalah sumber kekuatan bangsa dan negara. (4) dan orang miskin membutuhkan perubahan.⁶²

Pendidikan bagi masyarakat marjinal juga memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Pendidikan dapat memperluas kebebasan orang-orang dalam memilih dan bertindak, memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat dan melengkapi mereka dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan mata

⁶⁰Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 212.

⁶¹Ace Suryadi, HAR, Tilaar, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁶²Mohammad Saroni, *Op. Cit.*, hlm. 63.

pencaharian mereka.⁶³ Berdasarkan hal tersebut pendidikan bagi masyarakat marginal merupakan suatu kekuatan untuk mengubah dan memperbaiki kehidupan agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa pesantren dapat menjadi saluran mobilitas vertikal bagi para santrinya. Pendidikan pesantren dirasakan dapat memberikan begitu banyak manfaat. Seperti contohnya dari hasil penelitian salah satu jurnal yang dijadikan sebagai bahan kajian literatur yang ditulis oleh Ahmad Khoir dengan judul *Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam*. Dalam jurnal tersebut disebutkan tokoh lulusan pesantren yang sukses dalam berkarya, seperti Habiburrahman El Shirazy, Ahmad Fuadi, Prof. K. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., Dr. Ali Alatas, Kiai Abdurahman Wahid. Mereka semua merupakan lulusan-lulusan pesantren yang sukses dalam berkarya dan juga membangun negeri.⁶⁴

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-

⁶³Kevin Watkins, *Op.Cit.*, hlm. 136.

⁶⁴Ahmad Khoir, 2017, *Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam*, dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, hlm.138.

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data.⁶⁵ Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menganalisis dan menafsirkan makna data suatu fenomena sosial secara induktif dengan cara mendeskripsikan hasil analisis peneliti melalui upaya-upaya pengumpulan data yang spesifik.

Peneliti menggunakan metode tersebut karena memerlukan informasi yang mendalam untuk mendeskripsikan tentang bagaimana peran pondok pesantren yang dalam hal ini adalah Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburodalam memberikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin. Dengan melakukan interaksi sosial dengan informan dan lingkungan pesantren, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan kehidupan sosial dari sudut pandang informan sehingga permasalahan penelitian dapat dideskripsikan secara ilmiah. Peneliti juga berusaha memahami permasalahan penelitian dan kemudian menganalisisnya dengan konsep atau teori yang relevan dengan penelitian.

1.7.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif. Secara lebih spesifik, subjek penelitian adalah informan yang merupakan orang dalam pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan

⁶⁵John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.4.

informasi tentang situasi dan kondisi latar tempat penelitian.⁶⁶ Adapun subjek pada penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kepengurusan Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo. Subjek penelitian ini terdiri dari enam orang. Satu orang informan kunci yang merupakan Pimpinan sekaligus Pendiri Pondok Pesantren Darul Quran, satu orang informan merupakan pengelola keuangan Pondok Pesantren Darul Quran, satu orang informan merupakan Staff Bidang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Quran, satu orang kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, satu orang guru sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, satu orang pengasuh santri putra dan guru ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo. Hal tersebut dipilih karena informan tersebut dinilai mengetahui banyak informasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan gratis oleh Pondok Pesantren Darul Quran. Penjabaran terkait informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁶Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, hlm. 195.

Tabel I.3 Karakteristik Informan

NO	NAMA	POSISI	PERAN DALAM PENELITIAN
1	H. Ahmad Abdul Halim	Pendiri Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo Tangerang	Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilakukan oleh pesantren dalam rangka membuka pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin.
2	Usep	Bendahara Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo	Memberikan informasi tentang pengelolaan dana filantropi oleh pesantren
3	Yoyoh Muhaeroh, S,Pd.I	Bidang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo	Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan formal khususnya pendidikan jenjang MTS
4	Imas Masitah, S,Pd.I	Kepala Madrasah Ibtidaiyah Lantaburo dan guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Lantaburo	Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan formal khususnya pada jenjang pendidikan dasar
5	Ndhi Gandhi, S,Pd.	Guru sekolah MTS Cordova di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo	Memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran di pesantren
6	Acep Muhammad Fahmi	Pengasuh santri putra dan merupakan tenaga pendidik serta guru ekstrakurikuler di pesantren	Memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran, kegiatan harian santri, serta kegiatan ekstrakurikuler di pesantren

(Sumber : Diolah oleh Penulis, September 2018)

1.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gang. H. Rain, Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang Banten. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi ini untuk dijadikan lokasi penelitian adalah karena lokasi tersebut merupakan tempat

berdirinya lembaga pendidikan islam yang dalam penyelenggaraan pendidikannya menggratiskan biaya bagi masyarakat dari golongan miskin. Dalam strategi untuk membuka akses pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin, Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo sejak awal didirikannya mengkhususkan merekrut santrinya dari kalangan tidak mampu atau masyarakat miskin. Berdasarkan hal tersebutlah, peneliti ingin melihat bagaimana peran Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam memberikan pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin yang berasal dari berbagai daerah. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan September 2018 sampai dengan Mei 2019.

1.7.3. Peran Peneliti

Peran peneliti disini sebagai orang yang meneliti dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap realitas sosial yang ada di lapangan. Peneliti berusaha mencari tahu dan memperdalam bagaimana peran Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin. Peneliti juga turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang maksimal. Dengan demikian peneliti mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dala penelitian ini, peneliti juga berperan sebagai instrumen dan sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa teknik diantaranya

1. Wawancara Mendalam

Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang beragam dari para informan dalam berbagai situasi dan konteks. Peneliti menggunakan Teknik wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara pada penelitian ini berupa pedoman garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pada wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, sehingga dapat memperdalam informasi yang didapatkan. Peneliti mewawancarai bagaimana peran Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam memberikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kegiatan Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo Tangerang dalam kegiatan pendidikan yang dikelola oleh pesantren, kegiatan pengelolaan dana filantropi oleh pesantren, dan mengamati kegiatan para santri dalam ruang lingkup pesantren

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yakni pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Peneliti mengambil berbagai macam bentuk data pendukung penelitian, berupa gambar, artikel, data kepengurusan atau keanggotaan, hasil rekaman, memo, dan fieldnote. Hal ini dilakukan untuk digunakan sebagai data pendukung laporan penelitian selain hasil wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam upayanya memberikan akses pendidikan bagi kaum miskin. Dokumentasi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan penelitian, seperti struktur kepengurusan, gambaran umum, letak geografis, program kegiatan, jaringan yang terjalin, serta berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumentasi yang mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun dokumen sekunder adalah berkas-berkas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo. Peneliti menggunakan sumber-sumber berupa buku, jurnal, tesis, disertasi yang diambil dari berbagai macam sumber seperti perpustakaan serta web lainnya.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh, tahap berikutnya yang penting untuk dilakukan adalah melakukan analisis

data. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diperkaya dengan studi literatur yang ekstensif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh informan baik yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi yang sudah dilakukan dengan catatan lapangan dari dokumen yang sudah ada, akan dianalisis oleh penulis dengan cara diinterpretasi ke dalam suatu abstraksi dan kerangka penelitian tertentu. Hasil wawancara dan observasi merupakan data primer yang akan dianalisa dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari buku. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *equality of education* atau pemerataan kesempatan pendidikan serta konsep-konsep lainnya yang diperoleh di lapangan.

1.7.6. Triangulasi Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Mathions menjelaskan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.⁶⁷

⁶⁷John W. Creswell, 2014, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.241.

Melalui triangulasi data, penulis bermaksud untuk menguji kebenaran suatu data dengan membandingkannya dengan berbagai sumber data di lapangan. Dari sinilah data yang didapatkan akan menghasilkan suatu kemungkinan apakah data tersebut sesuai atau tidak sesuai, konsisten atau tidak konsisten dengan realita yang terjadi di lapangan. Hingga pada akhirnya penulis akan dapat mengungkapkan hasil temuan yang lebih beragam dan menguji suatu data melalui proses triangulasi data ini. Adapun dalam proses triangulasi data, peneliti melakukan triangulasi dengan dua orang yang mengetahui dengan baik, serta merasakan dampak dari penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo.

Tabel I.4 Triangulasi Data

No	Nama	Posisi/Jabatan
1	Irwan	Tokoh masyarakat
2	Muhammad Ridwan	Alumni
3	Muhammad Yunus	Santri
4	Damah	Orang tua santri
5	Ria	Orang tua santri
6	Abas	Donatur perorangan
7	Saadah	Kordinator sumbangan pengajian

(Sumber : Diolah dari Hasil Observasi, Desember 2018)

Pada akhirnya, proses triangulasi menjadi penting dilakukan untuk menyamakan perspektif antar peneliti dengan realitas yang terjadi pada lembaga pendidikan berbasis masyarakat Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo. Proses triangulasi data ini dilakukan untuk menganalisis peran

Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam memeberikan pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin

1.7.7. Kerangka Penelitian

Selain menitikberatkan pada proses pengumpulan data dan triangulasi data, sebuah penelitian juga harus dilakukan secara sistematis. Kerangka berpikir penelitian dalam tulisan ini diperlukan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan dan memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan isi dari penelitian yang dilakukan sekaligus juga menguji keilmiahan suatu penelitian.

Perumusan suatu kerangka berpikir dalam penelitian ilmiah merupakan proses penting yang harus dilakukan. Kerangka berpikir disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan.⁶⁸ Kerangka berpikir kemudian menjadi argumentasi peneliti untuk menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara barbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan

Dalam penelitian yang dilakukan, kerangka berpikir menjadi instrumen yang akan menentukan ke arah mana fokus penelitian akan dilakukan. Kerangka berpikir juga dibuat untuk menghindari terlalu banyak data yang

⁶⁸M. Yunus. S.B, 2014, *Mindset Revolution: Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas*, Yogyakarta: JB Publisher, hlm.83.

tidak diperlukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penelitian tetap berada dalam batasan yang seharusnya.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa peran lembaga pendidikan berbasis masyarakat melalui program pendidikannya mempunyai peran yang sangat besar dalam membuka akses atau kesempatan memperoleh pendidikan bagi kaum miskin. Pemerataan kesempatan pendidikan dilakukan dengan empat cara, yaitu yang pertama melalui *equality of access*, *equality of survival*, *equality of output*, dan yang terakhir adalah *equality of outcome*. Dengan program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat bermanfaat besar bagi masyarakat miskin dan yang utama adalah dapat membuka akses memperoleh pendidikan bagi kaum miskin.

1.8. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian harus memiliki sistematika penelitian, penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian ini disajikan dalam lima bab dan beberapa subbab. Dalam penelitian yang dibuat ini, bab satu akan menjabarkan mengenai latar belakang penelitian sehingga dapat terlihat permasalahan penelitian yang muncul yang terdiri dari dua pertanyaan penelitian. Dua pertanyaan penelitian tadi memiliki tujuan agar peneliti lebih fokus terhadap fenomena yang sedang dikaji. Selanjutnya, terdapat juga tujuan penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konsep metode penelitian dan sistematika penelitian. Semua ini bertujuan untuk

mengetahui kerangka dasar dalam penelitian ini dibuat dan hal ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peran pemerataan kesempatan pendidikan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam membuka akses memperoleh pendidikan bagi kaum miskin.

Bab II berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian ini yakni Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo. dalam bab ini terdiri dari subbab-subbab yang menjelaskan terkait profil dari Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo yang didalamnya berisi gambaran umum Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, dinamika perkembangan Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, dan yang terakhir adalah program pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo.

Bab III berisikan tentang pelaksanaan pemerataan kesempatan pendidikan bagi kaum miskin oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo. Sub bab pertama membahas mengenai perekrutan pengurus dan santri Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, subbab kedua membahas mengenai mobilisasi sumber dana pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, dan subbab terakhir mengenai impikasi dari program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo.

Bab IV berisikan analisis peran Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo dalam memberikan pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin. Sub bab pertama membahas mengenai pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang memberikan pemerataan pendidikan bagi kaum miskin, sub bab kedua membahas mengenai mobilisasi dana filantropi dalam upaya pemerataan akses pendidikan bagi kaum miskin, subbab ketiga membahas mengenai dimensi pemerataan kesempatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, dan subbab terakhir membahas implikasi pemerataan kesempatan pendidikan yang diupayakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo.

Bab yang terakhir, yakni bab V merupakan bagian penutup pada tulisan ini. Bab ini berisi tentang kesempatan peneliti menyimpulkan laporan penelitian secara menyeluruh. Adapun kesimpulan ini merupakan jawaban eksplisit dari pertanyaan penelitian. Selain itu peneliti juga memberikan saran untuk Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo sebagai pertimbangan untuk kedepannya.